

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Skripsi ini berusaha membongkar misteri beroperasinya sistem neoliberal sebagai suatu keyakinan bahwa skema kekuasaannya mampu menciptakan jalan keluar dari kemiskinan kepada kemakmuran. Ia menawarkan berbagai mekanisme yang didasarkan pada hak individu sebagai instrumen mencapai kebebasan pasar. Untuk mencapai pasar yang bebas maka diperlukan penelusuran akan rumusan kebijakan kerja sama, perdagangan bebas, internalisasi nilai pasar dan peran institusi.

Demikian yang disampaikan Immanuel Kant; bahwa perdamaian abadi hanya dapat diciptakan jika semua negara mengadopsi sistem demokrasi, membentuk organisasi, dan menciptakan ketergantungan antara negara dan pasar. Etika moral dan otoritas kekuasaan negara perlu dilandaskan pada keadilan dan kesejahteraan. Hal tersebut menguatkan pernyataan akan keyakinan bahwa neoliberal mampu mendorong kemakmuran yang berkonsekuensi pada perdamaian abadi. Etika moral dan otoritas kekuasaan negara perlu dilandaskan pada keadilan dan kesejahteraan (Mukhaer 2024).

Beranjak pada keyakinan bahwa neoliberal merupakan sistem yang mampu mendorong kemakmuran, maka riset ini berusaha untuk menelusuri kebenarannya pada isu pengentasan kemiskinan di Asia Tenggara melalui operasi mekanisme neoliberalisme. Ia menganalisis bagaimana kekuasaan disiplin yang diterapkan oleh

kebijakan-kebijakan neoliberal memengaruhi dinamika sosial-ekonomi di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dengan eksplorasi akan intervensi ekonomi, regulasi pasar, dan reformasi kebijakan, penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana strategi-strategi neoliberal berhasil atau gagal dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial sebagai faktor pembangunan di negara-negara tersebut.

Produksi relasi kekuasaan dan pengetahuan telah menjadi labirin alam bawah sadar subjek dalam menentukan langkah-langkah utopia kebijakan. Wacana neoliberal menjadi menarik untuk diteliti karena memposisikan negara dan warganya patuh akan klaim keindahan akan kesejahteraan ekonomi di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Di balik narasi tersebut, terselip mekanisme-mekanisme kontrol yang sering kali mengaburkan realitas ketimpangan dan marginalisasi. Ia tidak lepas dari produksi subjek yang diatur oleh logika pasar dan kompetisi. Identitas ini melekat erat dengan *homo economicus* neoliberal, hadir sebagai figur ideal yang merasionalisasi keputusan berdasarkan manfaat ekonomi semata.

Michel Foucault dalam *The Birth of Biopolitics* menjelaskan bahwa *homo economicus* dalam neoliberalisme beroperasi sebagai subjek yang terintegrasi sepenuhnya dalam logika pasar. Ia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bertransaksi demi keuntungan pribadi, namun menjadi agen yang secara aktif merespons insentif dan risiko yang diatur oleh kebijakan ekonomi. Operasinya berpegang pada konsep rasionalitas, di mana setiap tindakan manusia dipahami sebagai bagian dari kalkulasi ekonomi. Kekuasaan neoliberal kemudian menjadi kerangka yang memproduksi individu sebagai subjek yang ‘bebas,’ namun terikat

pada struktur kompetisi dan efisiensi yang diatur oleh institusi (Foucault 2008, 215-233).

Berangkat dari pemikiran Foucault, bahwa akan selalu hadir pendisiplinan diskursus hingga secara nyata menciptakan persetujuan aktif pada setiap individu sebagai subjek oleh relasi kuasa dan pengetahuan yang sedang terjadi dalam perwujudannya. Ia kemudian membuat diskursus neoliberal berhasil terselubung dalam setiap hasrat individu untuk terbebas dari kemiskinan, merdeka dalam rasionalitas ekonomi. Kekuasaan atas diskursus tidak dapat timbul semata-mata atas adanya kuasa atau pengetahuan saja, relasi keduanya yang justru memengaruhi satu sama lain. Ia segar untuk dibahas, diteliti, dan dimaknai dalam dinamika ilmu hubungan internasional terkait pendisiplinan atas rezim kebenaran.

Pendisiplinan individu oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan dengan kata lain memproduksi sebuah rezim kebenaran, diikuti oleh kepatuhan dalam alam pengetahuan. Penelitian ini akan menelusuri jejak kepatuhan atas rezim kebenaran tersebut dengan pendekatan *disciplinary power* dan mekanisme genealogi khas Michel Foucault pada masyarakat Asia Tenggara, di mana kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan masih dianggap sebagai jalan menuju kesejahteraan. Ia unik karena akan melihat fenomena pendisiplinan oleh ideologi pasar di Asia Tenggara yang beriringan dengan agenda pengentasan kemiskinan.

Manifestasi dari rezim kebenaran merupakan hasil interaksi nyata dari kekuasaan dan pengetahuan. Keduanya beroperasi dalam mengontrol pergerakan tubuh oleh penjara akal melalui rezim kebenaran itu sendiri. Foucault menemukan bahwa terdapat rezim kebenaran dalam kepatuhan pada diskursus dan bentuk-

bentuk pengetahuannya. Ia merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal jika seseorang mampu untuk mengamati sebuah teks dengan seksama. Sebuah hal yang perlu dipertanyakan tentang apa yang memerintah di balik sebuah rezim kebenaran (Foucault 1980, 119).

Enigma persetujuan aktif dalam pendisiplinan individu berdinamika terhadap eksistensi masyarakat dan kebenarannya sendiri. Setiap individu ini kemudian mengkollektifkan kebenarannya sendiri pada komunitas, atau singkatnya setiap pendisiplinan setiap individu menjadi bagian pendisiplinan dalam populasi. Ia kemudian dapat ditelaah dengan suatu model gagasan yang Foucault sebut sebagai *disciplinary power*, di mana individu sebagai subjek mengalami pendisiplinan melalui institusi dengan pengawasan oleh konsep panoptikon, normalisasi, pemeriksaan, serta distribusi ruang dan waktu (Foucault 1975, 30)

Kekuasaan dan pengetahuan terus menerus beroperasi membentuk rezim kebenaran melalui analogi penjara tersebut, menciptakan tubuh individu yang sedang diawasi dalam penjara jiwa menjadi patuh sepanjang alam sejarah. Singkatnya, alam berpikir menjadi ‘penjara’ sesungguhnya bagi pergerakan tubuh. Relasi ini bersifat esensial saat realitas sosial, politik, dan individu itu sendiri terbentuk. Foucault berargumen bahwa kekuasaan pendisiplinan lewat analogi penjara tersebut memiliki kontrol kuat terhadap kebijakan yang terbentuk atas institusi sosial (Foucault 1975, 30).

Penelitian ini kemudian mencoba menyingkapkan retakan dan pemetaan dalam sejarah pada pendisiplinan dalam dinamika kekuasaan neoliberal di bidang ekonomi, khususnya dalam agenda mengentas kemiskinan. Sepanjang alam sejarah,

paham neoliberalisme telah masuk melalui celah-celah retakan ekonomi dan mencoba mendisiplinkan negara yang di dalamnya terdapat interaksi antar individu yang secara plural dapat disebut populasi. Fenomena pendisiplinan ini kemudian menjadi jalan pintas bagi negara-negara yang memerlukan ide besar baru agar dapat menyelamatkan diri dari krisis ekonomi, ialah yang diteliti pada penelitian ini.

Negara sebagai individu yang mengatur sifat alamiah individu selalu mencoba mempertahankan kepentingan nasional, khususnya kesejahteraan populasinya. Neoliberalisme merupakan pengajaran utama bagi tatanan ekonomi politik global yang merupakan hasil interaksi kompleks dari konsep negara kesejahteraan, liberalisme, dan penciptaan kekuasaan kelas pada level internasional pada masa ini. Ia bertentangan dengan pemikiran bahwa pemerintahan negara dapat menciptakan kesejahteraan. Kebebasan ekonomi swasta dan pasar lah yang akan membawa masyarakat bernegara dalam kesejahteraan dengan sendirinya (Harahap 2023, 57-61).

Neoliberalisme, yang mengedepankan prinsip kebebasan pasar dan privatisasi telah memengaruhi banyak negara untuk mengubah kebijakannya. Kebijakan publik yang sebelumnya dirancang untuk memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada masyarakat kini beralih menjadi kebijakan yang lebih menekankan efisiensi pasar, persaingan, dan pengurangan intervensi negara dalam bidang ekonomi. Pergeseran ini mengakibatkan pengurangan subsidi dan dukungan sosial, dengan keyakinan bahwa sektor swasta akan mengambil alih peran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Harahap 2023, 57-61).

Meskipun menawarkan pertumbuhan ekonomi, neoliberalisme telah berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di berbagai belahan dunia. Kebijakan yang meminimalisir intervensi pemerintah sering kali berdampak langsung pada masyarakat yang paling rentan. World Bank mencatat, hampir 700 juta orang di seluruh dunia hidup dengan pendapatan di bawah USD 2,15 per harinya. Ini adalah batas kemiskinan ekstrem yang signifikan bagi negara-negara berpenghasilan rendah (World Bank Group 2022, 1-231).

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dan kemiskinan menjadi topik makin serius, Sekitar 44% dari populasi dunia, atau sekitar 3,5 miliar orang, saat ini hidup dengan pendapatan kurang dari USD 6,85 per hari, yang merupakan batas kemiskinan yang berlaku untuk negara-negara berpenghasilan menengah atas. Sejak tahun 1990, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ini hampir tidak mengalami perubahan akibat pertumbuhan populasi (World Bank Group 2022, 1-231).

Data-data di atas kemudian menjadi relevan dalam konteks Asia Tenggara, di mana banyak negara menghadapi tantangan kemiskinan. Meskipun beberapa negara di kawasan ini telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan tetap menjadi isu yang mendesak. Menurut World Bank, pada tahun 2019, sekitar 22,4% populasi di Asia Tenggara hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan variasi signifikan antar negara. Ketidaksetaraan pendapatan pun mencolok, di mana 10% penduduk terkaya menguasai lebih dari 60% total kekayaan di kawasan ini (World Bank Group 2024).

Hal ini menyebabkan persepsi dunia terhadap Asia Tenggara dan kemiskinan menjadi krusial karena acap kali dihubungkan dengan status negara berkembang akibat warisan kolonialisme, konflik politik berkepanjangan, dan ketimpangan ekonomi. Meskipun kawasan ini kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk pertumbuhan, banyak negara di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan struktural, seperti infrastruktur yang kurang memadai, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, dan terbatasnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas (Jumadi 2017, 57-71).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir cenderung tidak merata, memperlebar kesenjangan antar kelas sosial sebagaimana tercantum pada data-data di atas. Faktor-faktor ini telah membentuk citra Asia Tenggara sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Sebuah paradoks yang tidak sinkron dengan janji kesejahteraan neoliberalisme. Negara-negara Asia Tenggara masih menjadi subjek yang patuh terhadap kebijakan-kebijakan ala neoliberal hingga masa kini, meski fenomena kemiskinan ini masih berulang dan tidak nampak akhirnya (Jumadi 2017, 57-71).

Sejak tahun 1980-an, banyak negara di Asia Tenggara beralih dari model ekonomi yang lebih terpusat ke arah liberalisasi pasar, privatisasi, dan minim peran negara dalam perekonomian. Kebijakan ini dirancang demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing dan pengembangan sektor swasta (Jumadi 2017, 57-71). Dinamika kebijakan neoliberal di Asia Tenggara menjadi lebih penting untuk ditelusuri karena ide-ide bahwa pasar yang bebas dan kompetitif akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan meningkatkan

lapangan kerja, pada gilirannya diharapkan dapat menghancurkan kemiskinan hingga akarnya.

Hasil idealisme kebijakan neoliberal terkait kemiskinan dan kesejahteraan bahkan tidak searah dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam narasi pertamanya untuk mengakhiri kemiskinan. Negara-negara di dunia, khususnya Asia Tenggara, seakan terjebak dalam narasi neoliberalisme yang bertentangan dengan kepentingan setiap individu sebagai bagian dari populasi di dalamnya. Melihat kemiskinan yang masih erat terjadi di Asia Tenggara, kebijakan ekonomi khas neoliberalisme yang selama ini diterapkan nampak belum efektif untuk menghapus kemiskinan.

Akan tetapi, bukanlah efektivitas maupun jalan keluar dari masalah tersebut yang akan disimpulkan oleh penelitian ini. Ia justru akan menganalisis fenomena kompleksitas kepatuhan negara akan anomali operasi kekuasaan neoliberalisme di Asia Tenggara. Penelitian ini bergenealogi sepanjang retakan sejarah sistem dan rasionalitas global, hingga secara spesifik menganalisis Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, konflik kemiskinan yang belum berakhir ini perlu untuk diteliti karena berkontradiksi dengan salah satu agenda besar global untuk menyejahterakan serta memberi kebebasan setiap individu untuk merdeka dari krisis ekonominya sendiri.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana sistem neoliberalisme beroperasi hingga tiba pada agenda mengentaskan kemiskinan di Asia Tenggara?
2. Mengapa Indonesia, Malaysia, dan Filipina, serta individu di dalamnya patuh terhadap agenda global neoliberalisme?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini hadir untuk menyelidiki misteri sistem neoliberal di balik wacananya di Asia Tenggara. Ia bermaksud untuk menganalisis dinamika pendisiplinan atas sistem neoliberal:

1. Untuk mengetahui operasi sistem neoliberalisme hingga tiba pada agenda pengentasan kemiskinan di Asia Tenggara
2. Untuk menyingkap pendisiplinan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, serta individu di dalamnya terhadap wacana global neoliberalisme.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian pengentasan kemiskinan ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru dan perspektif yang lebih dari sekedar menganalisis teks di balik penerapan paham-paham neoliberal dalam mengentaskan kemiskinan.

#### **1.4.1. Manfaat akademis**

Penelitian ini secara akademis mencoba untuk mengevaluasi kajian pembangunan Studi Hubungan Internasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dalam pemikiran kritis. Terlebih lagi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait rezim

kebenaran, pendisiplinan, serta analisis relasi kekuasaan dan pengetahuan dalam konteks ekonomi politik global dalam dinamika hubungan internasional lewat teori *disciplinary power*. Ia kemudian dapat bermanfaat untuk menjadi referensi studi mengentas kemiskinan dunia, khususnya di Asia Tenggara.

Penelitian ini pun diharapkan dapat bermanfaat di kemudian hari untuk menjadi dasar pemikiran akademis tentang pemutusan pendisiplinan. Kajian kekuasaan pada diskursus kebijakan dan ekonomi ini kedepannya dapat menjadi landasan penelitian lebih lanjut untuk eksplorasi pendisiplinan pada bidang-bidang yang memerlukan perhatian, di mana secara sadar maupun tidak sadar berperan besar pada dinamika internasional dan setiap individu di dalamnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan evaluasi bagi setiap aktor internasional di Asia Tenggara, baik institusi maupun penentu kebijakan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para aktor tersebut untuk menganalisis kekuasaan yang termanifestasi dalam rezim kebenaran neoliberalisme dan pendisiplinan negara maupun individu dalam populasi, hingga dapat menjadi rujukan pengambilan keputusan dengan sudut pandang baru.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas enam bab yang berisi sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan utama penelitian ini. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan anomali diskursus

neoliberal dalam pengentasan kemiskinan di Asia Tenggara. Bab kedua mencakup revid literatur untuk menunjukkan kebaruan penelitian, kerangka teoritik, operasionalisasi teori, dan hipotesis, serta metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, tipe penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data.

Bab ketiga dari penelitian ini membahas genealogi diskursus neoliberalisme dengan menganalisis dinamika relasi kekuasaan dan pengetahuan dalam ekonomi politik global. Bab keempat membahas rezim kebenaran neoliberalisme dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Bab kelima mengkaji kepatuhan Asia Tenggara terhadap rezim neoliberal dengan menggunakan teori *disciplinary power* oleh sensoritas pada internalisasi *homo economicus* neoliberal. Penelitian ini akan ditutup pada bab keenam yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.